



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pembiayaan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

The Influence of Local Revenue, Equalization Funds and Financing on Capital Expenditures of Districts/Cities in Aceh Province

Khaira Khirnika Nirda^{1*}, Marzuki², Ghazali Syamni³, Zulfan⁴

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Email: khaira.220410041@mhs.unimal.ac.id^{1*}, marzuki@unimal.ac.id², ghazali.syamni@unimal.ac.id³, zulfan.sb@unimal.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received : 06-07-2026

Revised : 08-07-2026

Accepted : 10-07-2026

Published : 12-07-2026

Abstract

This research aims to examine the influence of local revenue, revenue-sharing funds, general allocation funds, special allocation funds, and local financing on the capital expenditures of districts/cities Aceh Province. This research uses a combination of cross-section and time-series data in 23 districts/cities Aceh Province during 2020–2024. The data analysis method used is panel data regression with the help of EViews 14. The results of this research prove that local revenue and local financing do not have a significant effect on capital expenditure. Revenue-sharing funds and general allocation funds have a negative and significant effect on capital expenditure. Special allocation funds have a positive and significant effect on capital expenditure. The results of the research not only provide new insights into the situation of regional financial management in Indonesia, but can also be a basis for further refining and developing existing theories.

Keywords: *Capital expenditures, influence of local revenue, equalization funds*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pembiayaan daerah terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan gabungan data *cross section* dengan *time series* pada 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh selama tahun 2020-2024. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan *eviews* 14. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah dan pembiayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tidak hanya memberikan wawasan baru mengenai situasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, namun juga dapat menjadi landasan untuk lebih menyempurnakan dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

Kata Kunci: *Belanja modal, pendapatan asli daerah, dana perimbangan*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan anggaran mencerminkan kualitas pengelolaan



keuangan daerah serta menentukan keberhasilan pembangunan. Salah satu bentuk pengeluaran yang berperan langsung dalam pembangunan adalah belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Putri et al. (2024) menyatakan bahwa besarnya alokasi belanja modal mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendanaan pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pembiayaan daerah. Ketersediaan sumber-sumber pendanaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja modal secara optimal sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik fiskal yang berbeda dibandingkan provinsi lain karena memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat dalam jumlah yang relatif besar. Namun, berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2020–2024, perkembangan belanja modal masih menunjukkan fluktuasi antar daerah. Kondisi yang sama juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pembiayaan Daerah yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun dengan capaian yang berbeda pada setiap kabupaten/kota. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum selalu diikuti oleh peningkatan alokasi belanja modal, sehingga masih terdapat perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan melalui investasi aset tetap.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Modal masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa PAD maupun Pembiayaan Daerah tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik fiskal berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Objek penelitian meliputi 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan periode pengamatan tahun 2020–2024 sehingga diperoleh 115 observasi.



Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan penelitian, sedangkan dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (Y), sedangkan variabel independennya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3), Dana Alokasi Khusus (X4), dan Pembiayaan Daerah (X5). Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak *EViews* 14. Pemilihan model regresi panel dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) serta pengujian koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi Belanja Modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai maksimum (*maximum*), nilai minimum (*minimum*), dan standar deviasi (*standard deviation*) dari masing-masing variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	BM	PAD	DBH	DAU	DAK	PEMB
Mean	25.75230	25.40985	24.03911	26.97709	25.78351	23.02417
Median	25.81403	25.43965	23.82960	26.90750	25.72389	24.30403
Maximum	26.55463	26.50558	26.33290	27.64186	26.97342	26.25729
Minimum	24.82320	23.11499	23.04798	26.47222	24.68861	0.000000
Std. Dev.	0.424566	0.568361	0.673436	0.294677	0.453228	5.519917
Observation	115	115	115	115	115	115

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 1, seluruh variabel penelitian terdiri atas 115 observasi yang berasal dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai rata-rata sebesar 25,75230 dengan standar deviasi sebesar 0,424566 yang menunjukkan bahwa data relatif homogen. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan penyebaran data yang relatif rendah. Sementara itu, variabel Pembiayaan Daerah (PEMB) memiliki standar deviasi sebesar 5,519917, jauh lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, yang mengindikasikan adanya variasi pembiayaan yang



cukup tinggi antar kabupaten/kota selama periode penelitian. Perbedaan karakteristik data tersebut menunjukkan adanya variasi kapasitas fiskal daerah yang selanjutnya dianalisis menggunakan regresi data panel.

Estimasi Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri atas 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024 sehingga diperoleh 115 observasi. *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih karena merupakan model terbaik berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman. Hasil estimasi regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	124.0293	16.30472	7.606955	0.0000
PAD	-0.043836	0.126757	-0.345827	0.7303
DBH	-0.299485	0.078938	-3.793924	0.0003
DAU	-3.703729	0.665445	-5.565794	0.0000
DAK	0.380698	0.160885	2.366277	0.0202
PEMB	0.005923	0.005788	1.023375	0.3090
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.718552	Mean dependent var		25.75230
Adjusted R-squared	0.631206	S.D. dependent var		0.424566
S.E. of regression	0.257832	Akaike info criterion		0.334916
Sum squared resid	5.783531	Schwarz criterion		1.003247
Log likelihood	8.742342	Hannan-Quinn criter.		0.606188
F-statistic	8.226511	Durbin-Watson stat		1.953592
Prob (F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 2, nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,631206, yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pembiayaan Daerah mampu menjelaskan variasi Belanja Modal sebesar 63,12%, sedangkan 36,88% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai probabilitas sebesar 0,7303 ($>0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum mampu meningkatkan alokasi Belanja Modal karena sebagian besar penerimaan daerah masih digunakan untuk membiayai belanja operasional. Berdasarkan Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972), peningkatan kapasitas fiskal akan mendorong pembangunan apabila pemerintah daerah mampu mengalokasikan sumber daya secara efektif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum diikuti oleh peningkatan investasi daerah melalui



Belanja Modal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aisah et al. (2023) serta Alpi dan Sirait (2022), tetapi berbeda dengan Himawan et al. (2024) dan Harmayanti et al. (2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan PAD agar lebih diarahkan pada pembiayaan pembangunan dan penyediaan infrastruktur publik.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai probabilitas sebesar 0,0003 ($<0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan DBH belum diikuti dengan peningkatan Belanja Modal karena dana transfer masih lebih banyak digunakan untuk memenuhi belanja rutin pemerintah daerah. Menurut Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972), transfer fiskal bertujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan Iswara (2022) dan Fuady (2023), tetapi berbeda dengan Nurwahiddah dan Setiawati (2025). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pemanfaatan DBH agar lebih mendukung pembangunan daerah melalui Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU belum mampu meningkatkan Belanja Modal karena sebagian besar dana tersebut masih dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja operasional pemerintah daerah. Berdasarkan Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972), transfer fiskal dari pemerintah pusat bertujuan mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antardaerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DAU pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung investasi melalui Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Agussalim et al. (2025), tetapi berbeda dengan Kuntadi et al. (2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan DAU agar tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai probabilitas sebesar 0,0202 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DAK mampu meningkatkan alokasi Belanja Modal karena dana tersebut memang ditujukan untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional, terutama pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana pelayanan publik. Berdasarkan Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972), transfer fiskal yang dialokasikan sesuai kebutuhan daerah akan meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Alfasyah et al. (2024) serta Damanik dan Siregar (2021) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap



Belanja Modal. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mempertahankan pengelolaan DAK secara efektif agar manfaatnya terhadap pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan.

Pengaruh Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai probabilitas sebesar 0,3090 ($>0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan Belanja Modal karena lebih banyak digunakan untuk menutup defisit anggaran dan memenuhi kewajiban pembiayaan daerah. Berdasarkan Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972), kapasitas fiskal akan mendukung pembangunan apabila dikelola secara efektif sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pembiayaan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh belum diarahkan secara optimal untuk investasi aset tetap. Hasil penelitian ini sejalan dengan Arthadela dan Mildawati (2023), tetapi berbeda dengan Angreini et al. (2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan daerah agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan melalui Belanja Modal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pembiayaan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

SARAN

Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak hanya digunakan untuk memenuhi belanja operasional, tetapi juga diarahkan pada peningkatan alokasi belanja modal. Selain itu, pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dilakukan secara lebih efektif sehingga dapat mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan investasi pemerintah. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempertahankan efektivitas pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena terbukti mampu meningkatkan Belanja Modal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi Belanja Modal, seperti SiLPA, pertumbuhan ekonomi, atau tingkat kemandirian keuangan daerah, serta memperluas periode dan objek penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, Mustari, B., & Haliku, M. R. (2025). Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial Kajian Determinasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Provinsi Muda di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*.
- Aisah, T., Pratiwi, D. N., & Utami, W. B. (2025). *Optimalisasi pajak daerah dan pembiayaan daerah untuk belanja modal: Studi empiris pada Pemerintah Daerah Di Jawa Barat*. 2(1), 51–64. <https://doi.org/10.53088/kurva.v2i1.2111>



- Alfasyah, F., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar, S. (2024). Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 301–315. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.1000>
- Alpi, M. F., & Sirait, R. F. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Angreini, F., Sari, K. R., & Dwitayanti, Y. (2021). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Pembiayaan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. In *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* (Vol. 1, Number 2).
- Arifyani, D., & Khoirunurrofik, K. (2023). Education Sector Performance in the Frontier, Outermost and Least Developed (3T) and Non-3T Regions: The Role of the Specific Allocation Fund (DAK) in the Education Sector. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 5(3), 246–256. <https://doi.org/10.31685/kpxsfs85>
- Damanik, C. T., & Siregar, H. S. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32846>
- Ginting, M. C., Simanjuntak, A., Situmorang, D. R., Panjaitan, R. Y., & Simanjuntak, R. (2024). The Effect of Regional Original Revenue and Remaining Budget Financing on Local Government Financial Performance of Provincial Local Governments North Sumatra for The Period 2018 - 2022. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 6(2), 209–219. <https://doi.org/10.36985/zf0wsz66>
- Harmayanti, H., Semailla, B., Rahman, Z., & Manulusi, M. R. (2021). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(4), 805–816. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v4i4.609>
- Himawan, H. S., Mubarak, A., Wahyuni, E., Sari, E. E., & Sukmawati, E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Indonesia. In *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 16, Number 1). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/blnc>
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Fitriyanti, D. D., & Astri, S. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah*. 2(3). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3>
- Lubis, K. A. (2024). Aktualisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Ditinjau dari Prinsip Desentralisasi. *Grondwet*, 3(1), 315–326. <https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.37>
- Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(3), 1.
- Nurwahiddah, A., & Setiawati, E. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Indonesian Journal of Digital Business*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. 71, BPK RI (2010). <https://share.google/B3RNPWh7EjxNm781R>



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. 77, BPK RI (2020). <https://share.google/arviIAkwmbh3ZVYML>
- Putri, N. F., Indriani, R., & Rahmadini, D. (2024). Effectiveness of Local Revenue and Balance Funds on Capital Expenditure in Indonesian Local Government. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.31289/jab.v10i1.10791>
- Rahmawati, R. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. *Jesya*, 6(1), 794–803. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1019>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. 23, BPK RI (2014). <https://share.google/ofW8fwk6UAyYaePrX>
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. 33, BPK RI (2004). <https://share.google/CRDOXYtC7mKei9rkt>